

2021



Batang

2022



2023



2024



317,4 miliar

“PERSIMPANGAN JALAN”

KENAIKAN CUKAI ROKOK ATAU PEKERJA



Industri Hasil Tembakau (IHT) kini berada di titik kritis. Tekanan fiskal, regulasi yang semakin ketat, serta tren penurunan produksi rokok, hingga masih banyaknya produksi rokok ilegal membuat sektor ini menghadapi ancaman serius. Di satu sisi, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mentarget setoran bea dan cukai naik menjadi 334,30 triliun atau naik sekitar 7,7% dari perkiraan penerimaan pada 2025 sebesar Rp 310,35 triliun. Target kenaikan cukai ini tentunya akan membawa dampak pada IHT hingga ke para pekerjanya. Bahkan beberapa waktu lalu sempat terhembus kabar adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Gudang Garam Tbk. Kabar tersebut langsung ditepis oleh pihak manajemen dan menyebutkan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah pelepasan 309 karyawan melalui mekanisme pensiun normal dan pensiun dini secara sukarela, serta berakhirnya kontrak kerja sesuai batas waktu kontrak kerja. Di satu sisi, kondisi yang menghantam IHT ini juga berdampak pada PT Gudang Garam, terlihat dari penurunan laba yang cukup drastis pada semester pertama tahun ini. Jika kondisi ini berlanjut ditambah naiknya cukai rokok, maka akan terus mengancam IHT yang merupakan industri padat karya. Sehingga, ancaman PHK pada ribuan pekerja pun akan terjadi. Berkaca pada kondisi ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (16/9/2025) angkat bicara meminta pemerintah segera mengambil langkah serta menolak kenaikan cukai rokok. Ya, kenaikan cukai ini jelas akan berdampak pada IHT serta paling rentan terhadap dampak fiskal. Kenaikan cukai sedikit saja, dapat memukul kinerja industri dan berdampak pada pekerja. Dari ini, bak dihadapkan pada “persimpangan jalan” antara menaikkan cukai untuk mengejar target pendapatan negara atau memilih supaya IHT tetap berjalan sehingga mampu mengurangi ancaman terjadinya PHK dan ekonomi ribuan pekerja tetap terjaga.

EKONOM PERKIRAKAN DAYA UNGKIT PAKET STIMULUS EKONOMI **TIDAK SIGNIFIKAN**

Paket kebijakan stimulus ekonomi 8+4+5 yang digulirkan pemerintah pada semester II-2025 dan berlanjut 2026 diyakini akan berdampak positif bagi pertumbuhan. Namun demikian, daya ungkitnya diperkirakan tidak akan signifikan.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menekankan bahwa ke depannya pemerintah perlu lebih memprioritaskan paket stimulus yang berorientasi fokus pada produktivitas. Diantaranya adalah proyek padat karya seperti infrastruktur dan perhubungan, serta renovasi rumah tidak layak huni.

"Keduanya berdampak langsung, menciptakan lapangan kerja, mendongkrak daya beli dan meningkatkan produktivitas," kata Wijayanto Selasa (16/9/2025).

Wijayanto mengatakan paket kebijakan stimulus untuk delapan program akselerasi ekonomi pada 2025 dengan nilai Rp16 triliun hanya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional semester II, tetapi terbatas. "Dampak bagi ekonomi semester II pasti ada, tetapi tidak akan signifikan," tegasnya.

Sementara itu, saat mengevaluasi pelaksanaan stimulus pada semester I-2025, dia menilai paket kebijakan sebelumnya juga memberikan hasil positif, meski belum besar. "Hampir 100% sifatnya konsumsi, sehingga tidak sustainable (berkelanjutan) karena tidak meningkatkan produktivitas. Paket seperti proyek padat karya dan renovasi rumah tidak layak huni, merupakan model bagus yang kedepan perlu diprioritaskan," pungkasnya.

Sementara itu, pihak istana mengatakan bahwa paket stimulus 8+4+5 yang digelontorkan Presiden Prabowo Subianto diyakini akan mempunyai tiga dampak pada perekonomian Tanah Air. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal mengatakan tiga dampak tersebut adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertama, penyediaan lapangan kerja. Fithra menjelaskan paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja dan jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).

"Terutama ojol (pengemudi ojek online) yang kemarin mendapatkan concern yang lumayan besar dari



Sumber:
ANTARA

Presiden," kata Fithra dalam keterangan resmi, Selasa (16/9/2025).

Salah satu stimulus dalam 8 inisiatif utama adalah diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan untuk pengemudi ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.

Selanjutnya, program pemagangan 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan.

"Jadi, pemerintah menjamin 20 ribu fresh graduate ini untuk bisa langsung masuk ke sistem melalui pemagangan, sehingga pada akhirnya mereka tidak menjadi sumber daya yang menganggur," ujarnya.

Lalu, ada program padat karya tunai (cash for work) yang dianggarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU),

serta 5 paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto di antaranya: Kodes Merah Putih yang ditargetkan menyerap lebih

dari 1 juta tenaga kerja; dan Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja.

Jadi semua itu difokuskan pada bagaimana pemerintah menjawab tantangan mengenai penyediaan lapangan kerja berkualitas. Dan untuk gig worker, pemerintah menjamin keselamatan kerja mereka," imbuhnya.

Kedua, peningkatan daya beli masyarakat. Fithra menambahkan paket stimulus ini bakal menjaga daya beli, melalui penyaluran bansos beras 10 kg ke 18,3 juta penerima, perluasan PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja sektor pariwisata.

"Kalau masyarakat diberikan bantuan sosial, ini kan pasti akan mengurangi beban pengeluaran mereka. Kemudian iuran yang selama ini membebani juga disubsidi oleh pemerintah. Ini akan

berdampak pada daya beli masyarakat," jelas Fithra.

Ia menambahkan program Cash for Work di Kemen PU dan Kemenhun juga bakal menjaga daya beli lewat penciptaan lapangan kerja.

"Itu kan langsung ada proyeknya, menciptakan lapangan kerja. Pastinya berdampak pada daya beli karena mereka punya uang," tegasnya.

Ketiga, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tembus 5,2 persen pada akhir 2025.

"Seperti yang kemarin terjadi di kuartal II, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dijaga di atas 5,12 persen, salah satunya melalui stimulus yang fokus pada disposable income (pendapatan untuk dibelanjakan)," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan memberlakukan Program Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi pada 2025. Program ini terdiri dari delapan program akselerasi ekonomi 2025, empat program berlanjut pada 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai Rapat Kabinet dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

"Pertama, magang lulusan dari perguruan tinggi dengan kriteria maksimal fresh graduate 1 tahun, baik S1, D3, dan yang lain, itu di link and match dengan sektor industri, dengan penerima manfaat awal 20.000 orang," kata Airlangga.

Tak luput, Airlangga juga menuturkan untuk 8 Program Akselerasi 2025, terdapat program Bantuan pangan periode Oktober-November 2025 dengan total 10 Kg beras. "Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya Desember, itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun."

Kemudian, program bantuan lainnya yakni iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja bukan penerima upah, pengemudi ojol, ojek pangkalan, supir kurir dan logistik, dengan target penerima ada sekitar 731,3 ribu orang. diberikan diskon 50% utk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). (han,ist/lut)



Keduanya berdampak langsung, menciptakan lapangan kerja, mendongkrak daya beli dan meningkatkan produktivitas. Dampak bagi ekonomi semester II pasti ada, tetapi tidak akan signifikan,"

Wijayanto Samirin
Ekonom Universitas
Paramadina,

DPR SETUJUI 9 HAKIM AGUNG DAN 1 HAKIM AD HOC

Komisi III DPR RI menyetujui 9 nama sebagai hakim agung dan satu nama sebagai hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) Mahkamah Agung. Keputusan tersebut berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) yang diikuti 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc MA.

Agenda rapat hari ini yaitu yang pertama pandangan fraksi-fraksi terhadap persetujuan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 yang dibacakan oleh masing kapoksi atau yang mewakili, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan," sebut Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Parlemen, Selasa (16/9/2025).

Sesuai hasil persetujuan Komisi III menyetujui Suradi, Moh Pugh Haryogi, Agustinus Purnomo Hadi, Budi Nugroho, Hari Sugiharto, Ennid Hasanuddin, Heru Pramono, Muhayah, Lalilatul Arofah, Diana Malemita Ginting sebagai Hakim Agung dan Hakim Agung AD HOC HAM.

"Berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan, maka dengan ini Komisi III memberikan persetujuan Calon Hakim AD HOC dan Hakim Agung," tuturnya.

"Dengan telah memutuskan nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, maka selesai sudah seluruh rangkaian uji kelayakan, selanjutnya akan dilaporkan pada rapat paripurna," kata Habiburokhman.

Sebelumnya, dalam membacakan pandangan fraksi, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Safaruddin, mengapresiasi proses fit and proper test berjalan baik, transparan, dan akuntabel. Semua calon diberi kesempatan yang sama memaparkan visi dan misi serta komitmen menjalankan tugas sebagai hakim.

Selama proses fit and proper test anggota Komisi III DPR memberikan beragam pertanyaan mulai dari kompetensi teknis hukum, rekam jejak dan komitmen penegakan hukum berkeadilan dan berbasis HAM.

"Fraksi PDIP berpendapat calon hakim agung dan hakim ad hoc

haruslah pribadi berintegritas, kompeten, profesional dan berkualitas sehingga mampu memutus perkara secara adil, memberi kepastian hukum dan kemanfaatan," ujarnya.

Pandangan Fraksi Gerindra dibacakan anggota Komisi III DPR, Muhammad Rahul, yang intinya uji kelayakan yang telah berjalan ini mampu menghasilkan hakim agung dan ad hoc yang mampu menjaga wibawa MA. Memperkuat peradilan yang bersih, independen, dan berkeadilan. Membangun negara hukum secara demokratis dan berkeadilan, serta dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Berharap agar pelaksanaan calon hakim agung dan ad hoc berjalan lancar dan ciptakan hakim berintegritas demi kepentingan berbangsa dan bernegara," harap Rahul.

Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo membacakan pandangan Fraksi Partai Nasdem, yang menyebut integritas, moralitas, dan rekam jejak sebagai syarat mutlak calon hakim agung dan ad hoc. Setiap calon harus bebas dari kepentingan politik, bersih dari korupsi dan rekam jejaknya teruji menegakan hukum secara adil. "Kompetensi dan keilmuan harus mumpuni," imbuhnya.

Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibacakan anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil. Dia menyebut MA salah satu pilar utama tegaknya kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka, berkeadilan, dan terpercaya. MA menghadapi ujian seperti menumpuknya beban perkara yang harus diselesaikan tanpa mengabaikan kualitas putusan.

Calon hakim agung dan ad hoc HAM yang disetujui Komisi III diharapkan mampu membantu MA menyelesaikan dan memutus perkara yang ditangani. Nasir mengatakan partainya berkomitmen mendorong proses fit and proper tes ini



Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman usai pengambilan keputusan hasil fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc MA di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Parlemen, Selasa (16/9/2025).

menghasilkan calon hakim agung dan ad hoc HAM yang berkualitas untuk mewujudkan pengadilan bersih.

"MA harus menjadi institusi yang mampu memberi rasa keadilan, bebas dari berbagai masalah yang mencederai nilai keadilan dan wajah hukum yang memberi harapan bagi pencari keadilan," urainya.

Anggota Komisi III DPR, Hince Panjaitan, membacakan pandangan Fraksi Partai Demokrat yang menyebut kewajiban konstitusi DPR memilih dan menetapkan hakim agung sebagaimana Pasal 24A ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Fit and proper test yang dilakukan selama sepekan ini mendapat perhatian publik.

"Ini keputusan bersejarah untuk melengkapi hakim agung jadi benteng keadilan di tengah sorotan publik terhadap lembaga ini," tegasnya.

Hince menghitung dalam 15 tahun terakhir 39 hakim terjerat kasus korupsi, 31 hakim ditangkap KPK, kejaksaan agung menangkap 8 hakim dan lainnya. Fraksi Demokrat percaya masih ada hakim yang memaknai profesinya sebagai beban moral, bukan sekedar tangga karir.

"Ketika membuat putusan masih bertanya apakah ini adil atau terlihat adil. Kita mau mendapat calon hakim agung yang memenuhi rasa keadilan masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, menegaskan komitmen fraksinya dalam mendukung penguatan integritas Mahkamah Agung (MA) melalui proses uji kelayakan (fit and proper test) calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM 2025. Dia meminta para hakim yang lolos untuk memulihkan marwah MA.

Menurut Abdullah, lima tahun terakhir MA menghadapi ujian berat akibat kasus korupsi yang menyeret sejumlah hakim. Hal itu, katanya, harus menjadi pelajaran agar DPR RI lebih selektif dalam menentukan sosok-sosok yang akan duduk di kursi tertinggi peradilan.

"Jangan sampai kita mengulang kembali kesalahan dengan memilih calon yang tidak amanah. Uji kelayakan ini bukan hanya soal kecakapan hukum, tapi yang lebih utama adalah integritas dan

moralitas," tegas Abdullah, Selasa (16/9/2025).

Abdullah juga mengingatkan, profesi hakim memiliki tanggung jawab besar di hadapan manusia maupun Tuhan. Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa hanya hakim yang memutuskan perkara dengan kebenaranlah yang kelak mendapat tempat di surga.

Setelah melalui analisis mendalam terhadap rekam jejak para calon dan mendengar masukan dari berbagai pihak, Fraksi PKB di Komisi III DPR RI menyatakan persetujuan terhadap sembilan calon Hakim Agung dan satu calon Hakim Ad Hoc HAM.

Abdullah menekankan, pihaknya berharap para calon yang disetujui dapat bekerja profesional, menjaga independensi, dan mengembalikan marwah Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir rakyat dalam mencari keadilan.

"Menjadi hakim adalah amanah besar. Seperti diingatkan Al-Munawi dalam kitab Faydhul Qadir, bahaya menjadi hakim sangat besar karena godaan kekuasaan dan suap bisa menjerumuskan. Karena itu, integritas mutlak diperlukan," ujar Abdullah.

Fraksi PKB, lanjutnya, meyakini bahwa dengan penguatan moralitas dan profesionalitas para calon terpilih, Mahkamah Agung dapat kembali menjadi institusi yang dipercaya publik. (rls,ist/lut)

Berikut daftar sembilan Hakim Agung dan satu Hakim Ad Hoc HAM yang bertugas di MA:

Hakim Agung:

1. Heru Pramono, Hakim Agung kamar Perdata
2. Budi Nugroho, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak)
3. Hari Sugiharto, Hakim Agung kamar TUN
4. Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Agung kamar Militer
5. Diana Malemita Ginting, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak)
6. Lalilatul Arofah, Hakim Agung kamar Agama
7. Muhayah, Hakim Agung kamar Agama
8. Ennid Hasanuddin, Hakim Agung kamar Perdata

Hakim ad hoc HAM:

1. Pugh Haryogi, Hakim ad Hoc HAM



BBM habis di SPBU Shell Indonesia Cipondoh 1, Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. (Ist)

KRISIS BBM DI SPBU SWASTA DIKABARKAN PICU PHK

SPBU Shell dikabarkan melakukan pemutusan hak kerja (PHK) terhadap karyawannya akibat kelangkaan pasokan BBM. Shell tak membantah tegas kabar tersebut dengan mengatakan perusahaan melakukan penyesuaian jam operasional dan karyawan.

Kabar terkait PHK karyawan SPBU Shell sempat ramai di media sosial. Hal ini tak lepas dari habisnya stok BBM sehingga operasional sejumlah SPBU pun terganggu.

Di media sosial X, pemilik akun X @ganissatanica, Malik Ganis Ilman menuliskan, "Minggu ketiga September stock diprediksi habis sehingga banyak yang akan kena PHK. Shell akan tetap buka cuman jualan oli dan diesel (dengan komposisi 2 staff dalam 1 shift). Kemungkinan stok bensin Super & Power akan datang lagi di bulan Oktober antara minggu kedua/ketiga," tulis unggahan dilihat Selasa (16/9/2025).

Isu kelangkaan BBM di SPBU disebut-sebut karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mau menambah impor BBM untuk Shell dan SPBU swasta lainnya.

"Baru tadi liat thread soal ini, katanya ga lama lagi bakal ada phk besar buat karyawan shell, ya Allah pemerintah tuh maunya apa," kata netizen @in_lilaac mengomentari kabar pemerintah tak mau tambah impor BBM SPBU swasta.

Merespons kabar tersebut, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengungkapkan pihaknya memang melakukan penyesuaian kegiatan operasional.

"Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap, termasuk penyesuaian jam

operasional dan tim yang bertugas melayani para pelanggan," ujar Ingrid melalui pesan singkat ke redaksi.

Ingrid menekankan pihaknya tetap melayani pelanggan dengan produk BBM yang masih tersedia dan layanan lainnya; termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.

Adapun produk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU Shell hingga pemberitahuan lebih lanjut.

"Shell Indonesia senantiasa berupaya untuk memastikan kelancaran pendistribusian dan penyediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell. Kami terus berkoordinasi

dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan produk BBM jenis bensin dapat tersedia kembali," terang Ingrid.

Jawaban Pemerintah

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menegaskan belum ada laporan resmi.

"Pertama, saya belum dapat laporan soal itu," kata Indah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Ia menyebut kabar serupa pernah muncul beberapa bulan lalu. Setelah dilakukan pengecekan, isu tersebut tidak terbukti. "Makanya ini yang benar gimana gitu. Silakan aja kalau merasa dirugikan, silakan laporkan

ke Kemenaker," ujarnya.

Indah menjelaskan PHK tidak selalu jadi masalah selama ada kesepakatan kedua belah pihak. "Tapi kalau masalahnya PHK yang memang disepakati oleh kedua belah pihak, bahkan kan beberapa mendapatkan haknya lebih dari undang-undang. Enggak apa-apa, enggak mesti kita ributkan. Kalau disepakati loh ya. Yang masalah kan kalau (PHK) satu pihak," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis kabar kelangkaan stok BBM di SPBU swasta disebabkan masalah izin. Ia menegaskan pemerintah telah memberikan izin sesuai kuota per tahun dan di evaluasi berkala setiap tiga bulan sekali. (wid,rls,ist/dya)

Impor Satu Pintu di Pertamina, Ekonom: Berdampak ke Iklim Investasi

RENCANA pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberlakukan kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu lewat Pertamina menuai sorotan dari kalangan pengamat.

Kebijakan ini dinilai bisa menimbulkan konsekuensi besar, tidak hanya pada sektor minyak dan gas bumi (migas), tetapi juga terhadap iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menegaskan bahwa kebijakan impor BBM satu pintu akan mengurangi ruang gerak para pengelola SPBU swasta, seperti Shell dan bp.

Menurutnya, salah satu sumber keuntungan SPBU asing selama ini adalah kebebasan dalam mengimpor BBM langsung dari negara asal dengan harga lebih murah, sehingga mereka bisa melakukan efisiensi biaya.

"Dalam pengadaan impor BBM Satu Pintu, SPBU swasta tidak lagi

bebas dalam pengadaan impor BBM," ujar Fahmy, Selasa (16/9/2025).

Fahmy menjelaskan, dengan sistem baru ini, SPBU swasta wajib membeli BBM dari Pertamina dengan harga yang sudah ditentukan. Kondisi tersebut membuat margin keuntungan mereka semakin tertekan.

"Mereka harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga yang ditetapkan oleh Pertamina. Dalam kondisi tersebut, margin SPBU swasta akan semakin kecil," kata Fahmy.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa potensi kerugian bisa menimpa pengelola SPBU swasta akibat kebijakan ini. Jika pendapatan terus menurun, tidak menutup kemungkinan beberapa SPBU swasta akan memilih menutup usahanya.

"Tutupnya SPBU swasta akan berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia, tidak hanya di sektor migas, tetapi juga investasi sektor bisnis lainnya," tutur Fahmy.

Sebelumnya diberitakan, kebijakan impor BBM satu pintu

Dasar Aturan Impor BBM Satu Pintu

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang penggunaan PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan impor dan distribusi BBM bersubsidi.

Kebijakan Kementerian ESDM juga mengatur bahwa impor BBM dilakukan melalui mekanisme yang dikendalikan negara, bukan oleh swasta secara bebas.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ikut mengawasi distribusi agar sesuai kuota.



muncul akibat terjadinya kelangkaan pasokan di sejumlah SPBU swasta sejak Agustus 2025. Kementerian ESDM menyatakan pengelola SPBU asing tidak mendapatkan kuota impor tambahan sehingga kebutuhan mereka harus dipenuhi lewat mekanisme baru.(wid,rls,ist/dya)

Hanya Bertahan 27 Hari, KPU Batalkan Aturan Merahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mencabut aturan yang melarang publikasi 16 dokumen syarat pendaftaran capres-cawapres usai menuai polemik baru-baru ini. Artinya, sejak diteken 21 Agustus, Keputusan Nomor 731 itu hanya bertahan kurang dari sebulan atau 27 hari saja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Publik yang Dikecualikan KPU.

Pencabutan Keputusan KPU Nomor 731 itu disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers di kantor KPU, Jakarta, Selasa (16/9/2025) siang.

"Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU," kata kata Afif.

Secara garis besar, KPU lewat Keputusan itu sebelumnya bakal merahasiakan 16 dokumen yang syarat pendaftaran capres cawapres yang selama ini dibuka untuk publik. Beberapa dokumen itu mulai dari KTP, NPWP, akta kelahiran, riwayat hidup, hingga ijazah.

KPU beralasan, publikasi sejumlah dokumen itu merupakan informasi yang dikecualikan untuk dikonsumsi publik secara luas. Sehingga, publikasinya harus seizin pribadi.

KPU merujuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Di dalamnya menyebutkan, data-data pribadi hanya bisa diakses atas persetujuan pemilik.

"Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis," kata Afif di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

Banjir Kritik

Namun, keputusan itu belakangan banyak menuai kritik, termasuk dari Komisi II DPR selaku mitra kerja. Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda tak sependapat dengan dalih KPU yang menilai dokumen capres-cawapres sebagai dokumen yang dikecualikan terbuka dengan dalih UU Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut dia, informasi atau dokumen tersebut bukan rahasia negara dan tidak mengganggu privasi seseorang.

"Dan itu berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, mestinya bukan sebagai informasi yang dikecualikan. Kalau tidak bersifat sebagai kerahasiaan negara, dan tidak juga mengganggu privasi seseorang,"



KPU RI membatalkan aturan 73/2025 yang mengatur kerahasiaan dokumen capres-cawapres, Selasa (16/9/2025). Ist

kata dia saat dihubungi, Selasa (16/9/2025).

Sejak diteken 21 Agustus, Keputusan Nomor 731 itu hanya bertahan kurang dari sebulan atau hanya 27 hari. Afif mengakui banyak masukan hingga kritik dari publik terkait keputusan yang pihaknya ambil. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik tersebut.

"Pada akhirnya KPU, teman-teman sekalian mengapresiasi masukan-masukan dari berbagai pihak pasca

terbitnya keputusan KPU tersebut, keputusan 731," kata dia.

Senada, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengapresiasi KPU tersebut. "Polemik yang diakibatkan keputusan tersebut jauh lebih besar dari manfaat yang didapat, sehingga pencabutan keputusan itu sikap yang bijak yakni menolak kerusakan diutamakan daripada menarik kemalahatan," kata Khozin di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Momentum untuk Melakukan Reset

PENGAJAR Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Titi Anggraini menilai pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 merupakan momentum untuk mereset lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia itu.

Keputusan yang telah dicabut oleh KPU RI tersebut, sebelumnya mengatur tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan.

"Sudah saatnya penyegaran KPU dilakukan. Sekarang momentum untuk mereset KPU," kata Titi Anggraini, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Selasa (16/9/2025).

Mereset adalah tindakan untuk mengatur ulang atau mengembalikan sesuatu ke kondisi awal.

Titi mengatakan, keputusan KPU yang sempat menetapkan 16 dokumen syarat capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan jelas telah mencoreng kredibilitas KPU di mata publik.

Terbitnya keputusan tersebut

dinilai menunjukkan problematika serius dalam tubuh KPU, terutama soal cara pandang mereka terhadap prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Padahal, sebagai lembaga yang dituntut menjaga integritas dan transparansi, KPU seharusnya berhati-hati dalam membuat kebijakan yang menyangkut hak publik untuk tahu.

Tetapi, menurut Titi, kejadian ini menjadi catatan penting sekaligus alarm peringatan bagi KPU agar lebih matang, konsisten, dan berpijak pada prinsip dasar demokrasi dalam setiap kebijakannya.

"Transparansi bukan hanya soal merespons kritik, tetapi harus tertanam sejak awal dalam setiap pengambilan keputusan," tegasnya.

Kemudian, Titi mengatakan, KPU harus benar-benar berbenah mengoreksi paradigma dan prosedur pembuatan kebijakan di internal mereka.

Sebab, Titi menilai, uji kompetensi yang dilakukan di internal KPU cenderung eksklusif dan tidak partisipatoris. Hal itu,

Dia pun memahami ada semangat perlindungan data pribadi dalam keputusan KPU tersebut, namun pengaturan dalam keputusan itu yang bertabrakan dengan aturan lainnya.

"Sayangnya, ada norma yang bertentangan dengan norma lainnya," katanya.(wid,rls,ant/dya)

16 DOKUMEN PERSYARATAN CAPRES-CAWAPRES

(sesuai Keputusan KPU 731/2025, lalu dibatalkan):

- Fotokopi e-KTP & akta kelahiran WNI.
- SKCK dari Mabes Polri.
- Surat keterangan sehat dari RS pemerintah yang ditunjuk KPU.
- Bukti laporan harta kekayaan ke KPK.
- Surat keterangan tidak pailit/berutang dari PN.
- Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan DPR/DPD/ DPRD.
- Fotokopi NPWP & bukti SPT 5 tahun terakhir.
- Daftar riwayat hidup, profil, rekam jejak.
- Surat pernyataan belum pernah menjabat Presiden/Wapres 2 periode.
- Surat pernyataan setia pada Pancasila, UUD 1945, Proklamasi.
- Surat keterangan PN: tidak pernah dipidana ≥5 tahun.
- Bukti ijazah/kelulusan dilegalisasi.
- Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang/G30S/PKI (Polri).
- Surat pernyataan kesediaan jadi capres/cawapres berpasangan.
- Surat pernyataan mundur dari TNI/Polri/PNS sejak ditetapkan.
- Surat pernyataan mundur dari pegawai/pejabat BUMN/BUMD sejak ditetapkan.

menuturnya, merupakan karakter KPU sejak lama.

"Kurangnya partisipatoris dan kurang terbuka dalam pembuatan kebijakan ke pemilu. Walaupun ada yang dilibatkan, maka ada favoritisme melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan KPU saja atau mereka yang bukan pengkritik KPU," tuturnya.

"Sementara dengan kelompok yang berbeda, KPU hampir enggan berdialog dan melibatkan," kata Titi.(wid,rls,ist/dya)

Paguyuban Khawatir Transjatim 'Matikan' Eksistensi Angkot Malang

MALANG - Forum Komunikasi Paguyuban Angkutan Kota (Angkot) Malang merasa tidak pernah dilibatkan dalam forum resmi terkait rencana beroperasinya Transjatim koridor Malang Raya. Mereka khawatir program tersebut justru akan mematikan transportasi lokal yang masih bertahan hingga saat ini.

"Kekhawatiran kami itu jelas, (Transjatim) nantinya akan menghancurkan rekan-rekan angkot yang masih bertahan sampai hari ini," ujar Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Angkot Malang, Stefanus Hari Wahyudi, Selasa (16/9/2025).

Hari mengungkapkan, sampai saat ini belum pernah ada diskusi resmi antara pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dengan paguyuban angkot terkait implementasi Transjatim. Informasi mengenai program tersebut, kata dia, justru lebih banyak beredar melalui pemberitaan media.

"Kalau sekadar ngomong-ngomong pernah dengan Dishub Kota Malang, tapi secara resminya kami belum pernah diajak (diskusi). Kami

dari semua jalur belum pernah duduk bersama secara resmi membahas Transjatim. Ujung-ujungnya di media ramai mau mengaspal bulan Oktober nanti," jelasnya.

Ditambahkannya, komunikasi yang pernah terjalin hanya sebatas obrolan santai dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang. "Kami bertemu Pak Widjaja dan Pak Minto, tapi sekadar berbicara santai sambil mengopi," katanya.

Pihaknya juga menilai wacana menjadikan angkot sebagai feeder Transjatim belum memiliki kejelasan. Menurut Hari, janji kolaborasi seperti itu sebelumnya sudah sering dilontarkan, namun realisasinya tidak pernah berjalan.

"Jadi kami itu selama ini (seolah) dikasih angin segar, tetapi kami sudah paham, karena tidak dibarengi penerapan sesuai apa yang diomongkan. Sulitnya di situ," ujarnya.

Sebagai contoh, Hari menyinggung kebijakan penerapan satu arah di kawasan Kayutangan Heritage. Menurutnya, saat itu sempat ada pembahasan dengan sopir angkot,

namun setelah kebijakan diberlakukan, komunikasi berkelanjutan tidak pernah terjadi.

Karena itu, Forum Komunikasi Paguyuban Angkot Malang menyepakati penolakan terhadap rencana Transjatim. "Pada intinya rekan-rekan dari semua jalur sepatutnya menolak. Kami mohon dikaji ulang dulu, karena sopir angkot sudah berkurang pendapatannya. Kalau ditambah Transjatim, ya habis angkot nanti," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan program Transjatim memang masih membutuhkan pembahasan detail. Pasalnya, rencana tersebut merupakan bagian dari sistem



transportasi aglomerasi yang melibatkan lintas daerah di Malang Raya.

"Karena belum gamblang, ya. Ini kita masih belum detail tentang Transjatim ini. Jadi saya kira ini akan menunggu kota-kota/kabupaten di sekitar Kota Malang juga," kata Amithya. (Santi/Dya)

DPRD Soroti Peran BUMD saat Target PAD Kabupaten Malang 2026 Capai Rp1,2 T



Wakil ketua DPRD Kabupaten Malang, Kholiq. (Santi/Lentera)

MALANG - DPRD Kabupaten Malang menyoroti peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sorotan ini muncul seiring target PAD tahun anggaran (TA) 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp1,2 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kholiq, menegaskan

optimalisasi PAD harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, capaian PAD tahun 2025 perlu dievaluasi agar pemetaan potensi pendapatan dapat lebih dimaksimalkan pada tahun berikutnya.

"Prioritas kami tetap pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih diutamakan. Kemudian yang penting, PAD kita harus digenjot," ujar Kholiq, Selasa (16/9/2025).

Dijelaskannya, fokus DPRD Kabupaten Malang dalam peningkatan PAD salah satunya adalah sektor yang bersumber dari BUMD. Sejumlah BUMD dinilai belum menunjukkan kinerja maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Kholiq mencontohkan, Perumda Jasa Yasa dan Artha Kanjuruhan yang hingga kini masih belum optimal

dalam pengelolaan potensi usaha. Karena itu, legislatif mendorong agar kedua BUMD tersebut melakukan evaluasi menyeluruh. Serta meningkatkan inovasi bisnis sehingga dapat lebih berperan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, Kholiq menyebut belum tercapainya target PAD pada TA 2025, menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Ia berharap capaian PAD pada 2026 dapat terealisasi sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat berkurang.

Hal itu mengingat porsi terbesar pendapatan daerah Kabupaten Malang masih ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun anggaran 2026, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp3,7 triliun atau sekitar 75,16 persen dari total target.

Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya ditargetkan Rp11 miliar atau 0,22 persen.

"Ya, bagaimanapun kita nggak mau terus-terusan bergantung terhadap

dana transfer dari pusat. Apalagi kami melihat, di 2025 ini kan belum tercapai, harapannya nanti 2026 itu PAD-nya bisa tercapai. Supaya itu tadi, tidak ketergantungan," paparnya.

Untuk diketahui, saat ini DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rancangan tersebut, total pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp4,9 triliun. Angka ini naik 2,37 persen dari APBD Induk 2025 yang tercatat Rp4,8 triliun. Dari jumlah itu, PAD ditargetkan Rp1,2 triliun atau 24,62 persen dari total pendapatan.

Dibandingkan target awal APBD 2025, target PAD 2026 naik Rp18,1 miliar atau sekitar 1,50 persen. Untuk itu, Kholiq kembali menekankan, agar kenaikan tersebut dapat dicapai melalui kontribusi optimal dari BUMD.

"Itu yang kita genjot, makanya kita alokasikan untuk penyertaan modal meskipun nanti di Rancangan APBD belum tahu jumlahnya akan berapa," pungkasnya. (Santi/Dya)

SERANGAN BESAR ISRAEL HANGUSKAN GAZA CITY

Serangan besar-besaran Israel terhadap Gaza City terjadi pada Selasa (16/9/2025). Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan kota terbesar di Jalur Gaza itu kini tengah dilanda kebakaran.

Serangan Israel dilancarkan setelah Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Yerusalem awal pekan ini. Dalam pertemuan itu, Rubio memberi lampu hijau bagi rencana Israel untuk meluncurkan serangan besar baru ke Gaza City.

Katz menyebut, kawasan permukiman utama di Gaza City dilumat sijago merah.

"Kami tidak akan menyerah dan tidak akan mundur sampai misi tercapai," kata Katz seperti dikutip dari AFP.

Israel berulang kali mengancam akan meluncurkan serangan besar ke Gaza City. Mereka bersikeras akan menghancurkan Gaza demi memberantas milisi Hamas.

PBB memperingatkan betapa bahayanya serangan Israel ke Gaza City. Sebab, ada jutaan warga di sana yang kini menderita kelaparan imbas pembatasan bantuan masuk ke Gaza.

Seorang warga Gaza, Ahmed Ghazal, mengatakan beberapa bangunan rata tanah akibat serangan besar-besaran di sana.

Sementara itu, wartawan lokal di Gaza mengatakan serangan udara, artileri, dan tembakan Israel hampir terus-menerus terjadi di Kota Gaza. Rumah-rumah dilaporkan hancur, dan orang-orang terjebak di reruntuhan. Belum ada konfirmasi resmi mengenai serangan darat baru dari militer Israel.

Israel telah menuntut agar penduduk Kota Gaza meninggalkan kota dan menuju ke selatan menuju wilayah tengah Jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memperkirakan sekitar 250.000 warga Palestina telah mengungsi, meskipun ratusan ribu lainnya diyakini masih berada di wilayah tersebut.

Sebagian mengatakan mereka tidak mampu pergi ke selatan, sementara yang lain mengatakan Gaza selatan tidak aman karena Israel juga telah meluncurkan serangan udara di sana. Sebagian mengatakan mereka mencoba pergi ke selatan tetapi tidak dapat mendirikan tenda, sehingga kembali ke Kota Gaza.

Dukungan Rubio

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang berkunjung pada hari Senin (15/9/2025), menawarkan dukungan nyata terhadap keputusan pemerintah Israel untuk meninggalkan perundingan gencatan senjata dan menggunakan kekuatan untuk menghancurkan Hamas.

Meskipun Amerika Serikat menginginkan akhir perang secara diplomatis, "kita harus siap menghadapi kemungkinan hal itu tidak akan terjadi," kata Rubio. Ia mendukung tuntutan Israel agar Hamas menyerahkan senjatanya dan membebaskan semua sandera yang tersisa sekaligus, sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri perang.

Netanyahu memerintahkan militer



Serangan udara Israel yang menghantam dan menghancurkan beberapa bangunan. (Foto: Getty images)

bulan lalu untuk merebut Kota Gaza, yang ia gambarkan sebagai benteng terakhir kelompok militan yang meluncurkan serangan mendadak Oktober 2023 terhadap Israel yang memicu perang.

Sebagian besar Kota Gaza telah hancur lebur pada minggu-minggu awal perang di tahun 2023, tetapi sekitar 1 juta warga Palestina telah kembali ke rumah mereka di antara reruntuhan. Memaksa mereka keluar berarti hampir seluruh penduduk Gaza kini akan terkurung di perkemahan-perkemahan di sepanjang pantai selatan, yang disebut Israel sebagai wilayah kemanusiaan.

Pasukan Israel terus bergerak

dari pinggiran menuju pusat Kota Gaza. Sekitar 320.000 orang diperkirakan sudah mengungsi, sementara 650.000 lainnya masih bertahan, meski angka ini belum bisa diverifikasi. Ribuan warga terlihat meninggalkan kota secara berkelompok dengan membawa barang-barang mereka.

Pemimpin Israel menegaskan serangan ditujukan untuk membubarkan Hamas, dengan Netanyahu menuntut kelompok itu menyerah dan tak lagi berperan di Gaza. Sementara itu, militer telah meratakan bangunan di pinggiran Kota Gaza, termasuk menara-menara tinggi. (AFP, Reuters, BBC, ist/nei)

AS Lobi Qatar di Doha untuk Tetap Jadi Mediator



Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan istrinya Jeanette Dousdebbs Rubio selama kunjungan mereka ke Terowongan Tembok Barat, di bawah situs suci Yahudi, di kota tua Yerusalem, Minggu (14/9/2025). (Foto: AFP)

MENTERI Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan harapannya agar Qatar tetap berperan sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata Israel-Hamas. Pernyataan itu ia sampaikan sebelum bertolak menuju Qatar.

"Kami akan meminta Qatar untuk tetap melakukan apa yang telah dilakukan, dan kami sangat menghargainya, yaitu memainkan peran konstruktif dalam upaya mengakhiri ini," kaya Rubio kepada wartawan sesaat sebelum lepas

landas dari bandara Ben Gurion, Tel Aviv, Selasa (16/9/2025), dikutip dari AFP.

"Jelas mereka harus memutuskan apakah mereka mau melakukan [tetap menjadi negosiator --red] setelah apa yang terjadi pekan lalu atau tidak, tapi kami ingin mereka tahu jika ada negara mana pun di dunia yang dapat mengakhiri ini semua [serangan Israel di Gaza --red] lewat negosiasi, negara itu adalah Qatar," lanjutnya.

Rubio mengatakan Amerika Serikat akan bekerja bersama Qatar untuk segera menyelesaikan perjanjian pertahanan segera meskipun ada operasi militer Israel.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan menyerang Qatar lagi. Namun, Rubio tidak menyinggung itu di Israel.

Selama berada di Israel bersama Netanyahu, Rubio enggan memuji Qatar dan hanya menyatakan penting untuk melihat ke depan setelah serangan. Juru bicara Kemlu Tommy Pigott juga mengatakan bahwa Rubio di Doha akan menegaskan kembali dukungan penuh AS untuk keamanan dan kedaulatan Qatar usai serangan Israel.

Qatar menjadi pusat diplomasi sebagai penengah untuk mengakhiri operasi militer Israel di Gaza selama hampir tahun. Terlepas dari itu, Israel tetap menyerang Qatar dengan menargetkan pejabat tinggi Hamas yang berkumpul di sana untuk mendiskusikan proposal gencatan senjata baru dari AS.

Sementara itu, Netanyahu mengancam akan menyerang para pemimpin Hamas "di mana pun mereka berada" selama konferensi pers dengan Rubio pada hari Senin (15/9/2025), saat para kepala negara Arab dan Islam mengadakan pertemuan puncak untuk mendukung Qatar setelah serangan Israel minggu lalu di negara Teluk tersebut. (AFP, Reuters, ist/nei)

Khasiat Buah Kawista yang Jarang Diketahui

Masih banyak orang yang belum mengenal buah kawista, padahal khasiatnya sangat melimpah dan sayang untuk diabaikan. Buah dengan segudang manfaat ini bahkan telah digunakan sejak lama sebagai bagian dari pengobatan herbal tradisional di India.

Buah kawista (*Aegle marmelos*) banyak dijumpai di Pakistan, India, serta di sejumlah negara Asia Tenggara. Ukurannya hampir sebanding dengan buah jeruk, memiliki kulit keras berwarna kuning keabu-abuan, daging berwarna oranye pucat hingga cokelat karamel, serta mengeluarkan aroma harum yang menyerupai pisang.

Buah kawista yang sudah matang dinilai memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Biasanya buah kawista dinikmati secara langsung atau dicampur dengan gula aren, dibuat menjadi jus, diiris dan dikeringkan untuk dijadikan teh herbal, serta diolah menjadi selai. Buah kawista juga mengandung vitamin B, magnesium, zinc, tembaga, dan zat besi. Buah kawista juga mengandung vitamin B, magnesium, zinc, tembaga, dan zat besi.

Beragam Manfaat

Dengan kandungan berbagai nutrisi dan senyawa aktifnya, buah kawista menawarkan beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Berikut adalah beberapa manfaat buah kawista yang bisa diperoleh:

Menjaga Kesehatan Pencernaan

Buah kawista diketahui bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan senyawa aktif dalam ekstrak buah ini terbukti dapat memberikan efek perlindungan terhadap infeksi bakteri berbahaya di saluran pencernaan, terutama bakteri *Shigella dysenteriae* penyebab diare, demam, dan sakit perut.

Selain itu, kandungan serat yang cukup tinggi pada buah kawista mampu meningkatkan jumlah bakteri baik atau probiotik di usus dan melancarkan kerja usus dalam mencerna makanan, sehingga mengurangi risiko terjadinya berbagai masalah pencernaan, misalnya sembelit.

Mengobati Disentri

Selain bisa mengurangi frekuensi buang air besar, kandungan nutrisi di dalam buah kawis juga bisa mengobati salah satu penyebab diare, yaitu disentri. Disentri adalah infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai feses berdarah atau berlendir.

Disentri disebabkan oleh infeksi bakteri *Shigella* ataupun parasit *Entamoeba histolytica*, yang masuk ke dalam saluran pencernaan karena mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak bisa dijamin kebersihannya.

Mengonsumsi buah kawis

dapat membantu mengobati disentri karena adanya kandungan vitamin A, vitamin C, selenium, dan zinc. Vitamin C pada buah kawis memiliki peran penting dalam mengobati disentri karena memiliki efek antibakteri.

Menangkal Radikal Bebas

Teh herbal dari buah kawista kering diketahui kaya akan antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas atau stres oksidatif. Rutin mengonsumsi teh herbal dari buah kawista dinilai bisa membantu meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh. Dengan begitu, teh ini juga dapat mengurangi risiko terjadinya berbagai penyakit kronis yang disebabkan oleh stres oksidatif.

Menurunkan Kadar Gula

Sebuah penelitian kecil menemukan bahwa teh herbal buah kawista dapat menurunkan kadar gula darah. Meski hasilnya belum signifikan, teh herbal ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk Anda konsumsi sebagai upaya menjaga kesehatan, terutama jika Anda memiliki diabetes tipe 2.

Menurunkan Tekanan Darah

Buah kawista juga dinilai berpotensi untuk menurunkan tekanan darah. Ekstrak buah ini diketahui bisa meningkatkan pembuangan cairan tubuh yang berlebih melalui buang air kecil.

Cara kerja ini sama dengan cara kerja salah satu jenis obat penurun tekanan darah diuretik yang umum dipakai. Jadi, buah kawista mungkin bisa menjadi pilihan buah yang baik untuk penderita hipertensi.

Membuat Kulit Sehat

Manfaat buah kawista selanjutnya adalah untuk menjaga kesehatan kulit. Hal ini karena buah kawista mengandung banyak vitamin C, yaitu vitamin yang dapat merangsang pembentukan kolagen di kulit. Selain itu, antioksidan dalam buah ini juga dapat melindungi sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Perlindungan ini dapat mencegah terjadinya kerusakan kulit akibat sinar matahari, penuaan dini, melasma, dan kanker kulit.

Menurunkan Demam

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak buah kawista memiliki potensi untuk meredakan demam dan peradangan. Meski khasiat yang sama belum ditemukan pada konsumsi buah kawista secara langsung, tidak ada salahnya mengonsumsi buah ini sebagai sumber nutrisi dan antioksidan ketika demam. Manfaat buah kawista memang belum banyak dikenal dan efeknya sebagai obat herbal masih perlu diteliti lebih lanjut.

Mencegah Kanker

Kanker ditandai dengan pertumbuhan sel-sel secara tidak normal dengan sifat yang merusak jaringan normal yang ada di sekitarnya. Salah satu faktor yang dinilai bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker adalah paparan radikal bebas yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Buah kawis mengandung antioksidan yang diketahui bisa menangkal efek paparan radikal bebas. Inilah alasan mengapa buah kawis sering digadang-gadang bisa mencegah kanker.

(nei,ist/dya)



ASTRONAUT POTRET 'PAPAN CATUR RAKSASA' DI IDAHO



Sebuah foto menakjubkan hasil jepretan astronaut dari luar angkasa menampilkan hamparan lahan di Idaho, Amerika Serikat, yang menyerupai papan catur raksasa. Pola khas tersebut rupanya terbentuk dari program pengelolaan hutan yang telah dimulai sejak sekitar dua abad lalu.

Foto udara tersebut memperlihatkan area hutan di tepi Sungai Priest, di pegunungan utara Idaho, sekitar 65 kilometer di selatan

perbatasan Kanada. Tak jauh dari lokasi itu ada Whitetail Butte, sebuah pos pengawasan kebakaran hutan yang berada di tikungan besar sungai.

Papan catur raksasa ini membentang dengan lebar sekitar 8 kilometer di titik terluasnya dan terdiri dari kurang lebih 185 kotak, meskipun tidak semuanya terlihat jelas dalam foto udara. Menariknya, setiap kotak memiliki luas sekitar 130 ribu meter persegi, atau setara dengan 24 lapangan sepak bola, sehingga

menciptakan pola unik yang menyerupai papan permainan.

Pola tersebut terbentuk dari sistem pengelolaan hutan berbasis grid yang telah diterapkan sejak abad ke-19. Dalam praktiknya, kotak-kotak hutan ditebang secara bergantian untuk diambil kayunya, sementara kotak lain dibiarkan tetap tumbuh alami agar ekosistem tetap seimbang. Dengan cara ini, hutan tidak hanya dapat dimanfaatkan secara

berkelanjutan, tetapi juga menghadirkan pemandangan geometris yang memukau dari udara.

Pada kotak-kotak kosong, biasanya ditanam kembali bibit pohon baru untuk menjaga kelestarian hutan. Setelah pohon-pohon tersebut tumbuh dewasa dan siap dipanen, giliran kotak lain yang ditebang sehingga tercipta siklus berulang yang berkesinambungan. Foto udara yang menampilkan pola ini diduga diambil hanya beberapa tahun setelah panen terakhir, sehingga perbedaan antara kotak kosong dan kotak yang masih penuh pepohonan tampak begitu jelas.

Kehadiran salju membuat pola papan catur ini semakin kontras. Kotak kosong terlihat putih bersih tertutup salju, sementara kotak lainnya tetap dipenuhi pepohonan hijau yang mencolok. Meski pola unik ini juga dapat terlihat di musim panas, warnanya jauh lebih samar karena hanya menampilkan variasi hijau muda dan hijau tua di antara kotak-kotak hutan.

Foto ini diambil menjelang matahari terbenam, sehingga beberapa sisi gunung tampak bercahaya, sementara sisi lain tertutup bayangan panjang akibat sudut rendah cahaya matahari.

Sungai Priest sendiri merupakan bagian dari DAS (Daerah Aliran Sungai) Columbia. Dahulu, sungai ini digunakan untuk mengangkut kayu dari hutan menuju pabrik pengolahan di Idaho dan sekitarnya.

Metodenya disebut log driving, yakni kayu gelondongan diikat menjadi rakit lalu dihanyutkan mengikuti arus sungai. Para pekerja bahkan berdiri di atas rakit sambil menggunakan tongkat panjang untuk menjaga kayu tetap bergerak dan tidak macet di tikungan.

Namun, praktik ini dihentikan sejak 1990-an agar sungai bisa dimanfaatkan lebih banyak untuk kegiatan rekreasi. Kini, kayu diangkut lewat jalur darat menggunakan truk. Jika diperhatikan lebih detail, jalur jalan khusus itu tampak samar melintang diagonal melewati beberapa kotak papan catur di hutan Idaho. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Pentingnya

Merawat Tubuh dari Kepala hingga Kaki

Merawat tubuh merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan diri. Perawatan ini tidak hanya berfokus pada penampilan luar, tetapi juga menyangkut kesehatan kulit, kondisi fisik, hingga keseimbangan mental. Pada artikel ini akan dibahas berbagai jenis perawatan tubuh yang perlu diperhatikan serta alasan mengapa melakukannya secara rutin sangatlah bermanfaat.

Perawatan Wajah

Perawatan wajah merupakan salah satu bentuk perawatan tubuh yang paling umum sekaligus penting, karena bagian wajah menjadi pusat perhatian pertama. Dengan menjaga kesehatan kulit wajah secara teratur, kita dapat mencegah berbagai masalah seperti jerawat, penuaan dini, hingga iritasi yang sering kali mengganggu penampilan maupun kenyamanan. Kulit wajah yang terawat dengan baik juga mencerminkan kondisi tubuh yang sehat secara keseluruhan.

Langkah dasar dalam merawat wajah biasanya mencakup pembersihan untuk mengangkat kotoran, eksfoliasi guna menghilangkan sel kulit mati, hidrasi agar kulit tetap lembap, serta perlindungan dari paparan sinar UV yang berbahaya.

Perawatan Rambut

Rambut sering disebut sebagai mahkota, karena keindahan dan kesehatannya dapat memengaruhi

penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjaga rambut agar tetap sehat dan indah merupakan bagian penting dari perawatan tubuh yang tidak boleh diabaikan. Rambut yang terawat dengan baik tidak hanya terlihat menarik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup dan kebersihan diri.

Perawatan Kuku

Perawatan kuku merupakan bagian penting dari rutinitas perawatan tubuh yang sering kali terabaikan. Padahal, kuku yang sehat dan rapi tidak hanya membuat penampilan tangan serta kaki terlihat lebih menarik, tetapi juga menjadi tanda kebersihan dan kesehatan diri secara menyeluruh. Dengan merawat kuku secara teratur, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus menjaga fungsi kuku agar tetap optimal.

Perawatan Tubuh

Perawatan tubuh secara umum bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kelembutan kulit agar tetap terasa nyaman serta terlihat segar. Salah satu langkah yang sering dilakukan adalah penggunaan body butter atau lotion, yang bermanfaat untuk menjaga kelembapan kulit sepanjang hari. Dengan pemakaian rutin, kulit tubuh dapat terhindar dari kekeringan, pecah-pecah, maupun tanda penuaan dini sehingga tampil lebih sehat dan terawat. Selain itu, perawatan tubuh juga dapat dilengkapi dengan langkah khusus seperti body scrub. Metode ini

membantu mengangkat sel kulit mati, membersihkan pori-pori, sekaligus merangsang sirkulasi darah agar kulit terlihat lebih cerah dan halus. Perawatan sederhana namun efektif ini bisa dilakukan secara berkala di rumah, sehingga tubuh tetap segar dan kesehatan kulit terjaga optimal.

Perawatan Kesehatan Mental

Perawatan tubuh tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental yang sama pentingnya. Stres, tekanan pekerjaan, maupun rutinitas sehari-hari bisa memengaruhi suasana hati dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan mental menjadi bagian tak terpisahkan dari perawatan tubuh untuk mencapai kondisi sehat yang menyeluruh. Sementara itu, perawatan tubuh secara rutin memiliki banyak manfaat, antara lain:

Kesehatan Fisik

Perawatan tubuh yang baik dapat membantu mencegah masalah kulit, rambut, dan kuku yang umum, serta menjaga tubuh dalam kondisi yang sehat secara keseluruhan. Ini juga termasuk menjaga berat badan yang sehat dan menjalani pola makan seimbang.

Peningkatan Kesehatan Mental

Perawatan tubuh yang baik dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesehatan mental. Aktivitas seperti berkomunikasi dan yoga dapat membantu merasa lebih

tenang dan terhubung dengan diri sendiri.

Peningkatan Percaya Diri

Merawat tubuh dengan baik dapat meningkatkan rasa percaya diri. Kulit yang sehat, rambut yang rapi, dan kuku yang terawat dengan baik dapat membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri.

Pencegahan Masalah Kesehatan

Perawatan tubuh secara rutin juga dapat membantu mencegah masalah kesehatan yang lebih serius di masa depan. Dengan merawat tubuh kita sejak dini, kita dapat mengurangi risiko masalah kesehatan seperti penyakit kulit, kerontokan rambut, dan infeksi kuku.

Mengenal jenis-jenis perawatan tubuh dan memahami pentingnya perawatan tubuh secara rutin adalah langkah awal menuju kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Perawatan tubuh bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang kesehatan kulit, rambut, kuku, dan kesehatan mental kita. Dengan memberikan perhatian yang tepat pada perawatan tubuh, kita dapat merasa lebih baik, lebih sehat, dan lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Salah satu yang bisa kamu lakukan adalah menggunakan produk perawatan berbahan dasar natural untuk membantu merawat tubuh. Saatnya kamu mencoba berbagai pilihan produk berbahan dasar alami dengan kanda.(nei,ist/dya)

Persimpangan Jalan ...dari hal 1

DPR meminta pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2026, meskipun target penerimaan cukai naik pada tahun depan sebagaimana target penerimaan pajak.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Hanif Dhakiri, menilai industri rokok kini tengah mengalami tekanan usaha, sehingga tak patut bila pemerintah ikut-ikutan menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan.

"Kan kita sudah ada kesepakatan pajak dan cukai tagetnya naik. Tapi di tengah situasi seperti ini kita ingin pajak dan cukai tetap naik di satu sisi tapi tarifnya kan enggak boleh naik," kata Hanif dikutip cncbincindonesia Selasa (16/9/2025).

Dia pun meminta agar pemerintah mengambil langkah-langkah inovatif untuk mengejar target setoran cukai pada 2026 tanpa harus menaikkan tarif cukai, seperti CHT. "Itu artinya berbagai inisiatif baru, inovasi, dan segala macam menjadi penting untuk memastikan agar target dan pajaknya bisa naik tapi tarifnya tidak naik," tegas Hanif.

"Misalnya cukai rokok kan terkait industri padat karya. Kalau misalnya ini enggak naik aja juga problemnya sudah mulai muncul saat ini. Kalau sampai naik kan menjadi persoalan," ungkap Hanif.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mengatakan jika kondisi yang terjadi pada IHT ini tidak segera ditangani, situasi ini berpotensi menimbulkan gelombang PHK massal yang akan memperparah angka pengangguran dan menambah beban ekonomi nasional.

Irma menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat kondisi IHT yang kian tertekan. Menurutnya, tingginya cukai dan maraknya rokok ilegal menjadi penyebab utama situasi semakin sulit bagi pabrik.

"Pemerintah harus membereskan persoalan ini agar tidak terjadi PHK massal di pabrik rokok. Ini harus menjadi perhatian serius," ujar Irma dalam keterangan resminya Selasa (16/9/2025).

Ia menyoroti dampak besar dari peredaran rokok ilegal yang semakin terang-terangan merugikan industri resmi. Produk ilegal tersebut tidak membayar cukai, sementara harga rokok legal yang dikenai cukai resmi semakin tinggi. Hal ini menimbulkan ketimpangan besar di pasar.

DPR, lanjut Irma, berkomitmen mengawasi langkah pemerintah agar ekosistem industri tembakau kembali kondusif. "Kami di DPR akan mengkritisi, melakukan investigasi, dan memastikan solusi terbaik agar pengangguran berjemaah tidak semakin bertambah," tegasnya dilansir

viva.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, yang turut menyoroti kebijakan cukai, khususnya terkait industri rokok. Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati untuk menaikkan tarif cukai yang bisa berimbas pada keberlangsungan pabrik rokok besar.

Dia bahkan memberi contoh tekanan usaha yang tengah dialami industri hasil tembakau dengan menunjukkan viralnya informasi pemutusan hubungan kerja (PHK) para pegawai rokok Gudang Garam.

"Berita tentang sulitnya pabrik-pabrik rokok besar belakangan ini harus ditelusuri. Benarkah memang ada layoff ratusan karyawan? Kalau kenaikan cukai dilakukan secara agresif, perusahaan-perusahaan sigaret mesin tidak akan punya ruang menutup biaya produksinya," ungkapnya.

Dia mencontohkan, dari setiap seribu rupiah harga rokok, sekitar Rp760 merupakan beban cukai. Jika tarif cukai dinaikkan 10 %, maka beban itu akan makin besar dan memberatkan industri. "Sehingga kalau dinaikkan 10% berarti dari Rp 1.760 (harga rokok per batang plus cukai) menjadi Rp 840 tambahannya, enggak ada lagi ruang bagi perusahaan-perusahaan sigaret kretek mesin untuk sekedar menutup biaya produksinya," ujar Harris.

Oleh sebab itu ia mengungkapkan harapan para anggota Komisi XI DPR pemerintah tetap bisa menahan kenaikan tarif CHT meski harus mengejar penerimaan cukai yang naik pada 2026. Salah satu caranya dengan memberantas rokok ilegal.

"Caranya gimana? yang jelas seperti teman-teman katakan pemberantasan rokok ilegal, kalau ini bisa diberantas pasti kenaikannya luar biasa pak," tuturnya.

Sebagai alternatif, dirinya mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan cukai tanpa harus menaikkan tarif, yakni dengan memperkuat pemberantasan rokok ilegal dan impor ilegal. "Kalau Bapak bisa memberantas rokok ilegal, ini pasti kenaikannya luar biasa. Begitu juga dengan impor ilegal, ini bisa dijadikan sumber pendapatan tambahan," katanya.

Dia pun mengungkapkan adanya data dari lembaga riset Next Indonesia Center yang menunjukkan perbedaan pencatatan nilai ekspor antara Indonesia dan mitra dagang. Selisih tersebut mencapai 654,5 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp10.000 triliun.

"Ini berarti ada potensi pajak luar negeri yang tidak masuk. Data ini membuat saya miris karena menunjuk-kan masih banyak kebocoran yang harus ditutup," tegasnya.

Harris mendorong seluruh jajaran

Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai untuk bekerja lebih keras. "Saya tahu kerjaan Bapak sangat berat, tapi saya yakin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya," pungkask legislator daerah pemilihan Jawa Tengah IX.

Untuk diketahui, target setoran bea dan cukai pada 2026 naik menjadi 334,30 triliun. Nilai target itu naik sekitar 7,7 % dari perkiraan penerimaan pada 2025 yang sebesar Rp 310,35 triliun.

Terkait dengan masalah ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa juga sudah buka suara termasuk soal rencana kebijakan CHT 2026. Purbaya memastikan akan meninjau lebih jauh tentang kebijakan cukai rokok ke depan karena hingga saat ini belum ada keputusan tarif cukai rokok naik, tetap atau bahkan turun.

"Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu," ungkap Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Purbaya sempat mendengar maraknya aktivitas ilegal, namun hal tersebut perlu didalami sebelum melahirkan kebijakan. Apabila penanganan ilegal bisa membuahkan pendapatan yang besar, maka bukan tidak mungkin tarif cukai rokok tidak perlu naik.

Dalam catatan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dari total penindakan kepabeanan dan cukai sepanjang tahun ini sebanyak 15.757 kali dengan nilai Rp 3,9 triliun, di dominasi oleh penindakan produksi hasil tembakau ilegal.

"Katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya? Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatan saya? Darisitu nanti saya bergerak," jelasnya.

Purbaya mengatakan tidak menutup kemungkinan cukai rokok diturunkan. Namun, semua kebijakan itu akan bergantung pada analisa. "Kalau mau diturunkan seperti apa. Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan," kata Purbaya.

Dia menjelaskan, secara keseluruhan, produksi rokok Januari-Juli 2025 mencapai 171,6 miliar batang atau turun 1,85% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bila dirunut sejak 2018-2025, produksi rokok Januari-Juli 2025 adalah yang terendah dalam delapan tahun, kecuali pada 2023.

Meskipun produksi rokok menurun dan tak adanya kenaikan tarif, setoran cukai secara keseluruhan hingga Juli 2025 justru naik 9,26% yoy, dengan nilai menjadi Rp 126,85 triliun.

Rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun 2026 telah memicu kekhawatiran dari industri sigaret kretek tangan (SKT). Serikat pekerja dalam industri ini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menunda kebijakan tersebut.

Ketua Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Waljid Budi Lestianto, mengatakan bahwa aspirasi ini telah disampaikan secara resmi kepada Presiden.

"Kami berharap, jangan sampai kemudian penundaan kenaikan pajak ini tidak disertai juga dengan penundaan kenaikan tarif cukai rokok," kata Waljid pada Senin, (8/9/2025) dilansir Kompas.

Lebih lanjut Waljid menyatakan bahwa sektor SKT adalah yang paling rentan terhadap dampak fiskal. Kenaikan cukai sedikit saja, menurutnya, dapat memukul kinerja industri dan mengurangi pendapatan pekerja.

"Sektor SKT ini banyak menyerap tenaga kerja, sehingga ketika cukai naik sedikit saja itu sudah berpengaruh terhadap kinerja industri dan pasti akan berdampak kepada pendapatan mata pencaharian pekerja," jelas Waljid.

Melihat kondisi tersebut, maka serikat pekerja menilai bahwa pemerintah sebaiknya fokus memperkuat penerimaan negara lewat pemberantasan rokok ilegal, bukan lewat kenaikan cukai yang berulang.

Waljid juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Dia menegaskan bahwa fenomena ini semakin terbuka dan merugikan negara sekaligus industri resmi.

"Mereka tidak bayar pajak dan cukai, tapi peredarannya kini sudah terang-terangan. Kami minta pemerintah benar-benar tegas menindak," tegas Waljid.

Waljid bahkan meminta penundaan kenaikan cukai selama tiga tahun ke depan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kami sudah bersurat ke Presiden untuk menunda kenaikan tarif cukai rokok dan pajak rokok sampai tiga tahun ke depan. Semangatnya untuk menjaga daya beli masyarakat. Kondisi saat ini kan sedang tidak baik-baik saja," paparnya.

Sementara itu, Direktur dan Corporate Secretary PT Gudang Garam Tbk, Heru Budiman, mengakui bahwa kenaikan cukai rokok berdampak pada lesunya daya beli konsumen. Perusahaan berusaha mengatasi kondisi ini dengan meluncurkan beberapa varian produk baru.

"Perseroan telah meluncurkan beberapa varian produk baru pada tahun 2024 sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi lesunya daya beli konsumen di tengah tingginya cukai rokok dan semakin maraknya produk rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai dengan harga yang jauh lebih murah," ujar Heru dalam keterangan resmi pada Rabu (10/9/2025). (rls,ist/lut)

POLRI AJUKAN PERMOHONAN RED NOTICE RIZA CHALID KE INTERPOL

Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri melalui NCB Interpol Indonesia telah mengajukan permohonan penerbitan red notice terhadap tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Mohammad Riza Chalid, ke Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis.

Semua persyaratan pengajuan IRN (Interpol Red Notice) telah dipenuhi oleh pihak Kejaksaan Agung RI pada pekan lalu. Selanjutnya, kami langsung mengajukan IRN request terhadap subjek dimaksud (Riza Chalid)," kata Ses NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Untung Widyatmoko di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Terkait kapan red notice Riza Chalid akan diterbitkan, Untung mengatakan bahwa penerbitan itu menunggu hasil asesmen dari Markas Besar Interpol.

"Tentunya IRN yang bersangkutan akan terbit setelah dilakukannya asesmen oleh pihak Commission for the Control of Interpol's File (CCCCF)

dan Notice and Diffusions Task Force (NDTF) Interpol Headquarters," katanya.

Diketahui, Mohammad Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Selain itu, Riza juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana asal kasus korupsi tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Anang Supriatna, juga mengatakan untuk pencarian Riza Chalid pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada MCB Interpol untuk red notice.

"Untuk MRC (Mohammad Riza Chalid). Kita sudah minta selain pemanggilan, kita juga sudah melakukan permohonan red notice kepada MCB Interpol di Indonesia untuk diteruskan," kata dia, di sela menghadiri Peresmian Gedung dan Fasilitas Kantor di Kejati Bali, Denpasar, Bali, pada Selasa (16/9) sore.

Ia juga menerangkan, terkait Riza Chalid, Kejaksaan Agung tidak hanya terfokus pada kasus pemidanaannya tetapi berusaha untuk menghadirkan Riza Chalid dan menelusuri semua asetnya.

"Tapi kita juga tidak berfokus terkait kasus MRC. Kita tidak berfokus kepada pemidanaan, kita berusaha tetap untuk menghadirkan, tetapi kita juga berusaha menelusuri aset-asetnya," jelasnya.

Ia menyampaikan, bahwa terkait aset-aset Riza Chalid sudah banyak disita oleh Kejaksaan Agung. Tetapi, pihaknya akan tetap menelusuri aset Riza Chalid lainnya untuk pemulihan kerugian negara yang cukup besar.

"Banyak, beberapa aset yang sudah kita sita terkait dengan MRC. Itu, membuktikan bahwa paralel dengan penyidikan untuk mempidanakan. Tapi juga kita menelusuri aset untuk pemulihan kerugian negara yang lebih utama," ungkapnya.

Sementara, untuk keberadaan Riza Chalid, termasuk Cheryl Darmadi dan Jurist Tan semuanya berada di luar negeri. "Posisi yang terakhir mereka di luar negeri. Tiga-tiganya di luar negeri. (Untuk di negara mana saja) untuk saat ini tidak bisa saya ungkapkan, sudah dipantau," katanya.

Terkait untuk aset Riza Chalid yang telah disita, ia mengatakan masih dilakukan taksasi. Tetapi yang jelas rumah Riza Chalid yang berada di Bogor, Jawa Barat, sekitar 6 ribu meter telah disita dan juga ada beberapa kendaraan miliknya.

"(Kalau aset yang disita) MRC masih ditaksasi dulu. Yang jelas ada rumah yang hampir 6 ribu meter di Rancamaya (Bogor). Ada kendaraan juga, kita sedang menelusuri aset lain yang kita kejar. Tidak hanya di dalam negeri, mau di luar negeri kita sedang mencoba mencari dengan pihak-pihak terafiliasi juga," jelasnya dilansir merdeka.

"Kalau untuk yang terakhir selain MRC, terkait dengan (PT) Sritex kemarin, kita hampir Rp 500 miliar lebih, Rp 510 miliar aset yang kita taksasi, itu yang Sritex saja. Kalau MRC (Riza Chalid) itu yang saya sebut, ada beberapa unit kendaraan dan ada tanah bidang. Tapi penyidik tidak hanya tinggal diam dan terus mencari, karena kerugian cukup besar," ujarnya.

Kemudian, untuk kerugian negara yang ditaksir terkait Riza Chalid itu sekitar di atas Rp 50 triliun. "Iya triliun, di atas Rp 50 triliun, kalau tidak salah," jelasnya.

Kemudian, terkait kasus Riza Chalid apakah ada pengembangan dan mendapatkan temuan baru. Pihaknya menyatakan bisa saja kedepannya berkembang dan itu tergantung fakta hukum. Dia mengatakan bahwa pada prinsipnya penyidik profesional

menaikkan suatu perkara berdasarkan alat bukti yang ada dan fakta hukum yang terungkap.

"Sampai saat ini, baru ditetapkan beberapa yang sudah kita tahan, dan sudah ditetapkan tersangka. Bisa saja ke depan bisa berkembang, tergantung nanti fakta hukum yang berkembang," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Mohammad Riza Chalid (MRC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018–2023.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Riza Chalid melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama tersangka HB, AN, dan YRJ.

"Dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola Pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan penambahan penyimpanan stok BBM," kata Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Kamis (10/7).

Selain itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi memasukkan putri Surya Darmadi, Cheryl Darmadi ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Penetapan itu disampaikan Kejagung melalui unggahan Instagram pada Sabtu (9/8/2025).

"Tim Penyidik resmi mengumumkan status buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Tersangka CD (Cheryl Darmadi). Hal itu sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-16/F.2/Fd.2/12/2024 Tanggal 31 Desember 2024," demikian keterangan Kejagung RI.

Kemudian, Kejagung RI juga resmi menetapkan Stafsus eks Mendikbud Nadiem Makarim, Jurist Tan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). (abh,ist/lut)



Semua persyaratan pengajuan IRN (Interpol Red Notice) telah dipenuhi oleh pihak Kejaksaan Agung RI pada pekan lalu. Selanjutnya, kami langsung mengajukan IRN request terhadap subjek dimaksud (Riza Chalid),"

**Brigjen Pol.
Untung Widyatmoko**
Ses NCB Interpol Indonesia